

PENINGKATAN KOMPETENSI PEREMPUAN MELALUI KETERAMPILAN KOMUNIKASI DALAM MENGIKUTI PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF

Ummanah¹, Ari Anggarani², Dwi Wahyuningsih³
Universitas Esa Unggul^{1,2,3}
ummanah@esaunggul.ac.id¹

ABTSRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peningkatan kompetensi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif melalui penguatan keterampilan komunikasi. Selain itu, penelitian ini menganalisis perilaku personal politisi perempuan terkait kompetensi dan keterampilan komunikasi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali pengalaman dan strategi komunikasi calon legislatif perempuan di Daerah Pemilihan (DAPIL) V Duren Sawit, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan keterampilan komunikasi interpersonal dan publik yang baik meningkatkan efektivitas kampanye, membangun citra politik, serta memperkuat koneksi dengan pemilih dan struktur partai. Pelatihan partisipatif berbasis simulasi debat, studi kasus, dan mentoring terbukti meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan persuasi Calon Legislatif (CALEG) perempuan. Dapat disimpulkan bahwa penguatan keterampilan komunikasi politik perempuan melalui pelatihan yang terstruktur, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika digital merupakan investasi strategis untuk meningkatkan daya saing dan representasi perempuan di legislatif. Upaya ini tidak hanya berpotensi memenuhi kuota keterwakilan perempuan secara administratif, tetapi juga mendorong kualitas kepemimpinan yang inklusif, visioner, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: Kompetensi, Komunikasi, Perempuan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the improvement of women's competence in legislative candidacy through mastery of communication skills. Furthermore, this study analyzes the behavior of female politicians related to their communication competencies and skills. This study uses a qualitative approach with a case study method used to explore the experiences and communication strategies of female legislative candidates in Electoral District (DAPIL) V Duren Sawit, East Jakarta. The results show that mastery of good interpersonal and public communication skills increases campaign effectiveness, builds political image, and strengthens connections with voters and party structures. Participatory training based on debate simulations, case studies, and mentoring has been shown to increase the confidence and persuasive abilities of female legislative candidates (CALEG). It can be concluded that mastery of women's political communication skills through structured, sustainable, and responsive training to digital dynamics is an investment strategy to increase women's competitiveness and representation in the legislature. This effort not only has the potential to fulfill the quota for women's

representation administratively but also encourages inclusive, visionary, and public interest-oriented leadership qualities.

Keywords: *Competence, Communication, Women.*

PENDAHULUAN

Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dunia politik identik dengan laki-laki. Anggapan ini lahir dari pandangan yang tidak sepenuhnya tepat mengenai politik sebagai arena yang keras, kotor, penuh intrik, dan penuh persaingan agresif yang dianggap sesuai dengan karakteristik maskulin. Pandangan ini kemudian menciptakan batasan-batasan yang secara kultural dan sosial menekan ruang gerak perempuan untuk terlibat secara aktif dalam dunia politik. Perempuan kerap kali dihadapkan pada stigma bahwa mereka lebih cocok berada di ranah domestik, sementara ranah publik, termasuk politik, menjadi dominasi laki-laki. Akibatnya, keterwakilan perempuan di ruang-ruang politik, termasuk legislatif, masih jauh dari ideal.

Padahal, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas partisipasi perempuan di bidang politik, calon legislatif perempuan dituntut agar memiliki daya saing yang tinggi. Mereka harus mampu mengungkapkan ide-ide dan gagasannya kepada para calon pemilih serta menjalin sinergi dengan sesama perempuan lintas partai politik guna memperkuat basis dukungan. Tuntutan ini mengarah pada pentingnya kompetensi yang tidak hanya terbatas pada aspek teknis politik, tetapi juga pada keterampilan komunikasi yang efektif. Seorang calon legislatif perempuan harus mampu menyampaikan visi, misi, dan program kerja secara persuasif dan

inspirasi untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Studi terkini oleh Ono & Endo (2024) mengungkapkan bahwa meski populasi perempuan dan laki-laki hampir setara, representasi perempuan dalam legislatif negara-negara OECD rata-rata hanya mencapai sekitar 33,8 %, dengan hanya dua negara yang berhasil menyentuh ambang 50%. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan gender yang sistemik dalam ranah politik dan berakar sejak tahap pencalonan hingga pemilihan. Di sisi lain, hasil penelitian dari Kunto & Pesak (2025) menyatakan bahwa penerapan kuota calon legislatif perempuan 30 %, meski telah dilaksanakan sejak 2004 hanya menghasilkan representasi perempuan sebesar sekitar 20,5 % di DPR, karena masih terkendala budaya patriarki, minimnya keseriusan partai politik, diskriminasi terhadap kandidat perempuan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Hal senada diungkapkan oleh Tias et al. (2023) yang menyoroti bahwa kebijakan kuota tersebut, meski mampu meningkatkan jumlah perempuan di DPR, pada praktiknya masih bersifat simbolis karena kapasitas perempuan belum dimaksimalkan dan keterwakilan kerap dianggap sekadar formalitas semata.

Namun, kuota calon legislatif perempuan saja tidak cukup. Kesiapan individu perempuan yang mencalonkan diri terutama dari sisi kompetensi menjadi sangat penting. Mamangge (2022) menunjukkan

bahwa kualitas Calon Legislatif (CALEG) perempuan dapat dinilai melalui pengetahuan, keterampilan komunikasi dan lobi, serta kemampuan seperti loyalitas dan disiplin. Di samping itu, modal sosial dan ekonomi juga menjadi fondasi penting agar politisi perempuan dapat membangun kepercayaan publik dan menunjukkan kapasitas yang unggul.

Selanjutnya, Tyas et al. (2020) menambahkan bahwa kompetensi yang dibutuhkan perempuan dalam politik tidak hanya sebatas aspek teoritis, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk membingkai isu-isu sosial secara utuh dan solutif. Keterampilan komunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kompetensi ini, karena melalui komunikasi, perempuan politisi dapat menyampaikan pesan, visi, dan narasi politiknya kepada masyarakat dengan cara yang persuasif dan berpengaruh. Komunikasi politik dalam hal ini menjadi instrumen penting dalam proses membangun citra, menjalin relasi dengan konstituen, serta mengartikulasikan aspirasi publik menjadi kebijakan yang konkret.

Sayangnya, seperti diungkapkan oleh Kasim (2022), keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih sangat rendah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Penyebab utamanya adalah dominasi budaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai pihak yang lebih layak dan pantas untuk menduduki jabatan publik. Pandangan ini menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi kultural yang membatasi akses mereka terhadap proses pencalonan dan pengambilan keputusan politik. Akibatnya, meskipun berbagai regulasi telah dibuat, perempuan

masih belum dapat secara maksimal berpartisipasi dalam politik formal.

Dalam ranah ini, komunikasi politik memainkan peranan penting sebagai penghubung antara suara publik dan proses pembentukan kebijakan. Penelitian dari Kristina (2024) memfokuskan pada komunikasi persuasif yang dilakukan oleh calon legislatif perempuan. Temuan mengungkap bahwa teknik komunikasi yang paling efektif bukan hanya penyampaian informasi, melainkan pendekatan emosional melalui dialog langsung "*mouth to mouth persuasion*" yang dibangun berkelanjutan serta diaplikasikan melalui organisasi dan kaderisasi internal partai. Hal ini memungkinkan politik perempuan membangun koneksi mendalam dengan pemilih yang potensial. Temuan serupa juga diperkuat oleh Asriati et al. (2022). Mereka mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi politik yang efektif komunikator, pesan, media kampanye, konstituen, dan efek kampanye sebagai fondasi pembangunan hubungan dengan masyarakat.

Komunikasi yang baik juga mencerminkan kecakapan psikologis individu, sebagaimana dijelaskan oleh Angraini et al. (2021). Komunikasi merupakan kemampuan tingkat tinggi yang tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek emosional dan kognitif. Seorang komunikator yang andal mampu mengelola pesan, memahami audiens, dan memilih saluran komunikasi yang sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat. Dalam konteks pencalonan legislatif, kemampuan ini menjadi penting agar calon perempuan dapat menyampaikan pesan-pesan politik secara efektif, menyentuh hati

pemilih, dan membangun dukungan elektoral.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, kuota perempuan dalam daftar calon legislatif masih belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan pemerintah sebesar 30%. Rendahnya keterwakilan ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan, salah satunya adalah kurangnya kompetensi dan keterampilan komunikasi di kalangan perempuan yang ingin mencalonkan diri. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pencapaian kuota, sekaligus tantangan bagi partai politik untuk melakukan investasi sumber daya yang lebih serius dalam pengembangan kapasitas perempuan di bidang politik.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, penting untuk merumuskan sebuah model peningkatan kompetensi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang berfokus pada penguatan keterampilan komunikasi. Model ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam menyusun program pelatihan, mentoring, dan pendampingan yang sistematis bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik. Selain itu, pemahaman mengenai perilaku perempuan dalam politik melalui pendekatan kompetensi dan komunikasi juga menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana mereka merespon tantangan dan peluang yang ada.

Preferensi investasi masa depan dari setiap anggota partai juga patut untuk ditinjau, terutama dalam kaitannya dengan upaya memenuhi kuota keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Partai politik sebagai institusi yang

memiliki peran strategis dalam rekrutmen politik harus mulai merumuskan strategi jangka panjang yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan. Investasi ini tidak hanya dalam bentuk pelatihan teknis, tetapi juga dukungan finansial, politik, dan psikologis yang dapat mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan kompeten dalam mengikuti kontestasi politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model peningkatan kompetensi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif melalui penguatan keterampilan komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perilaku personal perempuan dalam konteks politik yang berkaitan dengan kompetensi dan keterampilan komunikasi. Dengan memahami perilaku ini, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keterlibatan aktif perempuan dalam dunia politik. Tujuan berikutnya adalah untuk mengkaji preferensi investasi masa depan dari setiap anggota partai politik sebagai bagian dari strategi untuk memenuhi kuota perempuan yang ditentukan oleh pemerintah. Preferensi ini akan mencerminkan keseriusan dan komitmen partai politik dalam menciptakan ruang yang inklusif dan adil bagi perempuan.

Penelitian ini menganalisis peningkatan kompetensi komunikasi politik bagi calon legislatif perempuan melalui studi kasus di Daerah Pemilihan V Duren Sawit, Jakarta Timur. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada evaluasi kuota secara kuantitatif atau membahas aspek komunikasi secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan temuan tentang

personalization *emotionalization* dalam kampanye digital (Geise et al., 2025), efektivitas *experiential learning* untuk pembelajaran keterampilan politik (Fruchard et al., 2024), serta kebutuhan literasi digital sensitif gender (Boulianne, 2025) ke dalam sebuah model pelatihan operasional yang memetakan kesiapan individu dan kesiapan institusional partai. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan panduan praktis bagi partai politik serta organisasi masyarakat sipil dalam merancang intervensi yang memastikan kuota gender berimplikasi pada representasi substantif.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas perempuan di dunia politik melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan komunikasi. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku perempuan dalam pencalonan anggota legislatif serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi partai politik dalam menyusun kebijakan investasi jangka panjang yang mendukung peningkatan representasi perempuan dalam politik formal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan demokratis di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal pada calon legislatif perempuan. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi terhadap

tiga calon legislatif perempuan dari partai politik berbeda serta dua warga di Daerah Pemilihan (DAPIL) V Duren Sawit. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola terkait kompetensi dan keterampilan komunikasi. Teknik ini dipilih untuk memastikan keakuratan informasi dalam memahami kompetensi dan keterampilan komunikasi calon legislatif perempuan.

HASIL PENELITIAN

Profil Calon Legislatif (CALEG) perempuan di Daerah Pemilihan (DAPIL) V Duren Sawit Jakarta Timur menunjukkan beragam latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan orientasi politik. Secara umum, para caleg perempuan di wilayah ini terdiri dari individu-individu yang memiliki semangat tinggi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan anak. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam hal kompetensi politik yang dimiliki oleh sebagian besar caleg perempuan. Kesenjangan ini berpengaruh terhadap efektivitas mereka dalam menyampaikan gagasan politik, membangun citra diri, dan meraih simpati pemilih. Dalam dinamika politik elektoral di tingkat lokal, kemampuan komunikasi menjadi salah satu penentu utama keberhasilan dalam meraih suara. Komunikasi politik yang baik mencakup keterampilan berbicara di depan umum, penguasaan isu-isu

strategis, kemampuan mendengarkan aspirasi masyarakat, serta membangun jejaring relasi yang kuat. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar caleg perempuan di Dapil V Duren Sawit Jakarta Timur menghadapi tantangan besar dalam menguasai seluruh aspek tersebut secara optimal.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan beberapa caleg perempuan dan pelatih politik, diketahui bahwa pelatihan kompetensi masih belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Sebagian besar caleg mengandalkan pengalaman pribadi, pembelajaran informal, dan bimbingan dari partai politik masing-masing yang sifatnya tidak terstruktur. Akibatnya, kesiapan mereka dalam mengikuti proses kampanye, debat politik, dan dialog publik masih terbilang lemah. Selain itu, terdapat kendala budaya dan struktural yang turut membentuk pola komunikasi para caleg perempuan. Dalam budaya politik patriarki, suara perempuan sering kali terpinggirkan, baik dalam forum internal partai maupun dalam ruang publik yang lebih luas. Hal ini menyebabkan sebagian caleg perempuan merasa kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan cenderung mengikuti arus dominasi politik laki-laki.

Salah satu aspek penting yang menjadi fokus dalam peningkatan kompetensi caleg perempuan adalah penguasaan keterampilan komunikasi persuasif. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menyampaikan visi-misi, mempengaruhi opini publik, dan membangun hubungan positif dengan konstituen. Keterampilan komunikasi persuasif tidak hanya mencakup penggunaan

bahasa yang efektif, tetapi juga penyesuaian gaya komunikasi dengan karakteristik audiens, penggunaan media sosial secara strategis, serta kemampuan membingkai pesan politik secara menarik. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa caleg perempuan yang mengikuti pelatihan komunikasi secara intensif menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa kampanye mereka. Mereka lebih mampu mengelola isu-isu yang diangkat, berinteraksi dengan masyarakat secara lebih aktif, dan menyampaikan pesan politik secara lebih tajam dan meyakinkan.

Dalam konteks pelatihan, beberapa program yang berhasil diterapkan melibatkan metode pelatihan partisipatif seperti simulasi debat, role-play, studi kasus, dan diskusi kelompok. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri caleg perempuan dan membentuk pola komunikasi yang lebih asertif. Selain itu, pelatihan yang melibatkan mentor atau tokoh perempuan inspiratif dari dunia politik turut memberikan dampak positif terhadap motivasi peserta. Mereka merasa lebih terhubung secara emosional dan ideologis dengan perjuangan perempuan dalam politik.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada aspek teknis keterampilan komunikasi. Terdapat pula tantangan struktural seperti akses terhadap sumber daya kampanye, dukungan partai yang tidak merata, serta stereotip gender yang masih kuat melekat. Caleg perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh panggung kampanye yang setara dengan caleg laki-laki. Beberapa partai politik masih menempatkan caleg perempuan

hanya sebagai pelengkap kuota, tanpa memberikan pelatihan maupun pembinaan yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan komunikasi caleg perempuan harus dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, media, akademisi, dan komunitas perempuan.

Penting untuk pahami bahwa keberhasilan perempuan dalam dunia politik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh dukungan sistemik yang mampu menghapuskan diskriminasi struktural. Oleh karena itu, pelatihan kompetensi komunikasi harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan perempuan secara menyeluruh, termasuk peningkatan literasi politik, pelatihan kepemimpinan, dan penguatan jaringan advokasi. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun ekosistem politik yang inklusif dan responsif gender, agar perempuan memiliki ruang yang adil untuk berkontribusi dalam proses demokrasi.

Lebih lanjut, pelatihan kompetensi komunikasi juga harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi. Di era digital saat ini, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan menyebarkan pesan politik. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi digital menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap caleg, terutama perempuan yang sering kali tidak memperoleh pelatihan teknologi secara optimal. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian caleg perempuan masih gagap teknologi dan belum mampu memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye

yang efektif. Mereka memerlukan pelatihan tentang strategi konten digital, manajemen media sosial, serta analisis data untuk memahami respons publik terhadap kampanye mereka. Dengan penguasaan keterampilan digital ini, caleg perempuan dapat lebih kompetitif dalam kontestasi politik dan menjangkau konstituen secara lebih luas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi dan keterampilan komunikasi caleg perempuan merupakan elemen kunci dalam mendorong partisipasi politik perempuan yang lebih bermakna. Dengan pelatihan yang tepat, pendampingan yang konsisten, serta dukungan kebijakan yang berpihak, caleg perempuan memiliki peluang besar untuk tampil sebagai pemimpin yang visioner dan komunikatif. Dapil V Duren Sawit Jakarta Timur sebagai salah satu wilayah strategis di Jakarta menjadi contoh penting bagaimana pelatihan yang berkelanjutan dapat menciptakan perubahan signifikan dalam representasi politik perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem pelatihan yang berkelanjutan, terukur, dan berorientasi pada penguatan peran perempuan dalam politik. Selain itu, penting untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya kehadiran perempuan di lembaga legislatif sebagai representasi keadilan dan keberagaman dalam pengambilan keputusan politik.

Melalui penguatan kapasitas komunikasi politik, perempuan dapat membongkar hambatan-hambatan struktural yang selama ini membatasi ruang gerak mereka dalam dunia politik. Mereka tidak hanya menjadi simbol representasi, tetapi juga agen

perubahan yang mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan lokal, budaya, dan dinamika politik daerah menjadi langkah strategis dalam membentuk caleg perempuan yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar partai politik, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dapat bersinergi dalam menyediakan pelatihan komunikasi yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan perempuan yang beretika, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi kekuasaan, tetapi juga ruang pembelajaran demokrasi yang setara dan berkeadilan gender.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi komunikasi politik merupakan determinan utama keberhasilan calon legislatif (caleg) perempuan dalam membangun citra politik, memengaruhi opini publik, dan memperluas dukungan elektoral. Kompetensi tersebut tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam menyampaikan pesan publik, tetapi juga meliputi kecakapan membangun jaringan strategis dan memengaruhi persepsi pemilih secara efektif. Pendekatan ini selaras dengan temuan Silvester et al. (2021), yang menunjukkan bahwa *political skill* kandidat politik berkontribusi signifikan terhadap efektivitas kampanye melalui peningkatan *campaign efficacy* dan intensi kampanye, yang pada gilirannya berdampak positif pada kinerja

elektoral. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Geise et al. (2025), yang menunjukkan bahwa strategi *personalization* yang dipadukan dengan *emotionalization* dimana penekanan pada ekspresi emosional individu kandidat, terbukti efektif membangun identifikasi dan keterikatan pemilih dalam kampanye digital. Strategi ini berpengaruh positif terhadap evaluasi kandidat sekaligus memobilisasi dukungan elektoral. Hal ini menguatkan pandangan bahwa interaksi *personal-emotif* berperan sebagai modal sosial penting dalam mempererat hubungan kandidat dengan konstituen.

Namun, dalam perspektif *Gender and Politics*, keberhasilan komunikasi politik caleg perempuan tidak dapat dilepaskan dari hambatan struktural yang mereka hadapi. Minimnya pelatihan, keterbatasan dukungan partai, serta budaya patriarki menjadi *structural barriers* yang membatasi partisipasi perempuan di arena politik (Dahlerup, 2021). Meskipun kebijakan kuota telah diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, Amiantova & Bitsadze (2022) mengingatkan bahwa tanpa penguatan kapasitas individu dan dukungan struktural yang memadai, kebijakan tersebut berisiko bersifat simbolis dan tidak berdampak pada kualitas representasi politik perempuan secara substansial.

Era politik digital memperluas peluang sekaligus menghadirkan tantangan baru. Media sosial kini menjadi arena utama pembentukan opini publik, di mana kandidat yang mampu mengoptimalkan platform digital memiliki peluang lebih besar menjangkau dan memobilisasi pemilih (Boulianne, 2025). Namun, sebagian caleg perempuan masih menghadapi *digital divide* yang

membatasi pemanfaatan media sosial secara optimal. Kesenjangan ini sejalan dengan temuan bahwa literasi digital merupakan elemen esensial dalam kompetensi politik kontemporer, dan masih terdapat perbedaan keterampilan berbasis gender dalam penggunaannya.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini menyoroti efektivitas metode pelatihan partisipatif, seperti *role-play*, simulasi debat, dan studi kasus, dalam meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi (Fruchard et al., 2024). Metode ini memungkinkan peserta mengalami situasi nyata secara aman, menguji strategi komunikasi, serta menerima umpan balik langsung dari fasilitator maupun sesama peserta. Pendekatan ini konsisten dengan kerangka *Experiential Learning* yang menekankan siklus pembelajaran melalui pengalaman langsung, refleksi, konseptualisasi, dan penerapan (Jamison et al., 2022). Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan konteks politik yang sesungguhnya. Selain itu, keterlibatan mentor perempuan senior dalam proses pelatihan terbukti memperkuat pembelajaran. Melalui observasi dan peniruan perilaku figur teladan, peserta memperoleh inspirasi, dukungan moral, serta strategi konkret untuk menghadapi tantangan politik (Salawu, 2025). Kehadiran mentor juga memperluas jejaring profesional, meningkatkan rasa percaya diri, mempercepat adaptasi, dan mendorong partisipasi aktif dalam ruang publik yang sering kali masih didominasi laki-laki.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan calon legislatif perempuan memiliki potensi implikasi yang signifikan terhadap lanskap politik Jakarta. Dengan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang lebih baik, para calon legislatif perempuan dapat secara aktif berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu gender, sehingga mendorong terciptanya kesetaraan dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini juga membuka jalan bagi peningkatan representasi perempuan di parlemen melalui pemenuhan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam sejumlah peraturan pemilu. Selain itu, peningkatan kompetensi ini dapat mengurangi hambatan struktural dan kultural yang selama ini membatasi partisipasi politik perempuan, memperkuat kepercayaan diri mereka, serta memberikan dorongan bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam ranah politik.

Kemampuan yang meningkat juga memungkinkan perempuan untuk tampil sebagai pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi tantangan politik yang kompleks, sehingga mereka mampu mengambil keputusan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Lebih jauh, partai politik pun akan diuntungkan dengan kehadiran anggota perempuan yang memiliki perspektif segar, pendekatan yang inovatif, serta strategi kampanye yang responsif terhadap kebutuhan konstituen. Dalam jangka panjang, peningkatan keterampilan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan daya saing individu perempuan dalam

dunia politik, tetapi juga dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Secara keseluruhan, penguatan kapasitas calon legislatif perempuan merupakan investasi strategis dalam mewujudkan sistem politik yang lebih adil, inklusif, dan demokratis di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiantova, I. S., & Bitsadze, N. (2022). Gender Quotas for Political Participation and the Case of Georgia. *RUDN Journal of Political Science*, 24(1), 136–147.
<https://doi.org/10.22363/2313-1438-2022-24-1-136-147>
- Angraini, D. I., Murisal, & Ardias, W. S. (2021). Pengaruh keterampilan komunikasi terhadap kesiapan kerja lulusan sarjana Sumatera Barat. *Jurnal Psikologi Islam*, 12(1), 84–100.
- Asriati, M., Lubis, L. A., & Ginting, R. (2022). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislator Perempuan pada Kampanye Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. *Komunika*, 18(2), 36–45.
<https://doi.org/10.32734/komunika.v18i2.8866>
- Boulianne, S., & Houle, N. (2025). Chocolate And Politics: A Crossnational, Survey-Based Experiment On Recruitment To A Boycott Campaign. *Mobilization: An International Quarterly*, 30(1), 73–88.
<https://doi.org/10.17813/1086-671X-30-1-73>
- Dahlerup, D., & Leyenaar, M. (2021). *Reaking Male Dominance in old Democracies*. Oxford University Press.
- Fruchard, L. F., Barbotin, V. M., Leichnam, A., Sin, M. T., Nizet, P., Tollec, S., Nativel, F., Vene, E., Fronteau, C., & Huon, J.-F. (2024). The impact of using simulation-based learning to further develop communication skills of pharmacy students and pharmacists: a systematic review. *BMC Medical Education*, 24(1), 1435.
<https://doi.org/10.1186/s12909-024-06338-6>
- Geise, S., Maubach, K., & Boettcher Eli, A. (2025). Picture Me in Person: Personalization and Emotionalization as Political Campaign Strategies on Social Media in the German Federal Election Period 2021. *New Media & Society*, 27(7), 3745–3769.
<https://doi.org/10.1177/14614448231224031>
- Jamison, C. S. E., Fuher, J., Wang, A., & Huang-Saad, A. (2022). Experiential Learning Implementation in Undergraduate Engineering Education: a Systematic Search and Review. *European Journal of Engineering Education*, 47(6), 1356–1379.
<https://doi.org/10.1080/03043797.2022.2031895>
- Kasim, S. S. (2022). Pengaruh Budaya Patriarki Pada Peran Politik Perempuan Dan Pengambilan Kebijakan Publik Di Parlemen. *Journal Publicuho*, 5(2).
<https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24734>

- Kristina, D. (2024). Komunikasi Persuasif Calon legislatif Perempuan pada Kampanye Pemilu 2024 (Studi fenomenologi pada Caleg Perempuan di Jawa Barat). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 6(1), 168–173. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3284>
- Kunto, F., & Pesak, S. (2025). Kuota 30% Perempuan di Parlemen: Implementasi dan Efektivitasnya di Indonesia. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 2(1), 64–73. <https://doi.org/10.63185/pjhp.v2i1.83>
- Mamangge, I. R. (2022). Kualitas Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kota Manado (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Manado). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 102–113. <https://doi.org/10.35797/jp.v11i2.42721>
- Ono, Y., & Endo, Y. (2024). The Underrepresentation of Women in Politics: A Literature Review on Gender Bias in Political Recruitment Processes. *Interdisciplinary Information Sciences*, 30(1), 2024.R.01. <https://doi.org/10.4036/iis.2024.R.01>
- Salawu, I. A. (2025). Are Female Politicians Interested in Mentoring Female Aspirants? A Study of Selected Female Politicians in Nigeria. *Journal of Asian and African Studies*, 60(4), 2170–2183. <https://doi.org/10.1177/00219096231207885>
- Silvester, J., Wyatt, M., Ellen, B. P., & Ferris, G. R. (2021). Candidate Effects on Election Outcomes: Political Skill, Campaign Efficacy, and Intentions in a British General Election. *Applied Psychology*, 70(4), 1628–1668. <https://doi.org/10.1111/apps.12292>
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>
- Tyas, A. A. W. P., Tippe, S., & Sutanto, S. (2020). How Employee Competency and Self Efficacy Affect Employee Work Engagement in Human Resource Development Agency (BPSDM) Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. *IJHCM (International Journal of Human Capital Management)*, 4(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.21009/IJHCM.04.02.11>